

GENDER DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
(Analisis Terhadap Peraturan Daerah Kab. Wajo No. 23 Tahun 2012 Tentang  
Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan  
Di Kecamatan Pammana tahun)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SULFIANA  
NIM: 30600113125

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “GENDER DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kec. Pammana Tahun 2015-2017).”, yang disusun oleh Sulfiana, Nim : 30 600 113 125, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari ....., tanggal ..... M, bertepatan dengan ..... H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).\*

Makassar, ..... M

..... H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A (.....)

Sekretaris : Syahrir Karim, M.Si., Ph.D (.....)

Munaqisy I : Dr. Abdullah Thalib, M.Ag (.....)

Munaqisy II : Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si (.....)

Pembimbing II : Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A

NIP : 19590704 198903 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas begitu banyak kasih sayangnnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gender dan kebijakan publik Dalam Impelementasi Peraturan Daerah Kab. Wajo No 23 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kecamatan Pammana”. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan dalam jenjang strata satu (S1) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

Tidak lupa salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad saw atas ajaran-ajaran beliau sehingga mampu memberikan pencerahan atas kebenaran-kebenaran Islam yang dibawanya. Semoga segala keteladanan beliau menjadi inspirasi bagi segala aktivitas kita semua.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis menghadapi beberapa kendala. Namun, atas kerja keras dan bantuan banyak pihak sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itulah penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ibunda tercinta Bunga dan ayahanda Muh. Aras yang telah mengasuh, menyayangi, menasehati, membiayai, dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, Selaku Rektor beserta Pembantu Rektor I, II, III, dan IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. Muh Natsir, M.A, Selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr.Syarifuddin Jurdi, M.Si, Selaku ketua Jurusan Ilmu Politik dan Syahrir Karim, M.Si, P.hd Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si, Sebagai Pembimbing I dan Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si Sebagai Pembimbing II yang tidak pernah bosan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Dr. Abdullah Thalib, M.Ag Sebagai Penguji I dan Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si sebagai penguji II.
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Semua informan yang telah bersedia menjadi narasumber penulis serta pihak-pihak terkait yang telah membantu.
8. Untuk Saudara Seperjuangan yang selalu setia membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini Putri Yuni Kartika, Rika, Tasria, Citra, dan teman-teman Ilmu Politik 7-8 yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu.
9. Teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang merupakan bagian dari tempat saya berdiakletika ilmu pengetahuan.
10. Teman-teman Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (HIPERMAWA) yang saling memotivasi dan menjadi pengganti keluarga ketika jauh dari keluarga
11. Kepada semua teman-teman Kuliah Kerja Nyata angkatan 53 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang selalu menyemangati dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada semua tempat dan orang-orang pernah aku temui dimana pun dan kapanpun. Kalian semua telah menjadi bagian dari dialektika pemikiran penulis.

Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga merasa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jika ada hal yang membuat pembaca atau pihak-pihak yang kurang berkenan, penulis ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga semua yang berpartisipasi mendapatkan pahala yang melimpah di sisiNya. Amin.

*Billahi Taufik Walhidayah*

*Wassalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatu.*

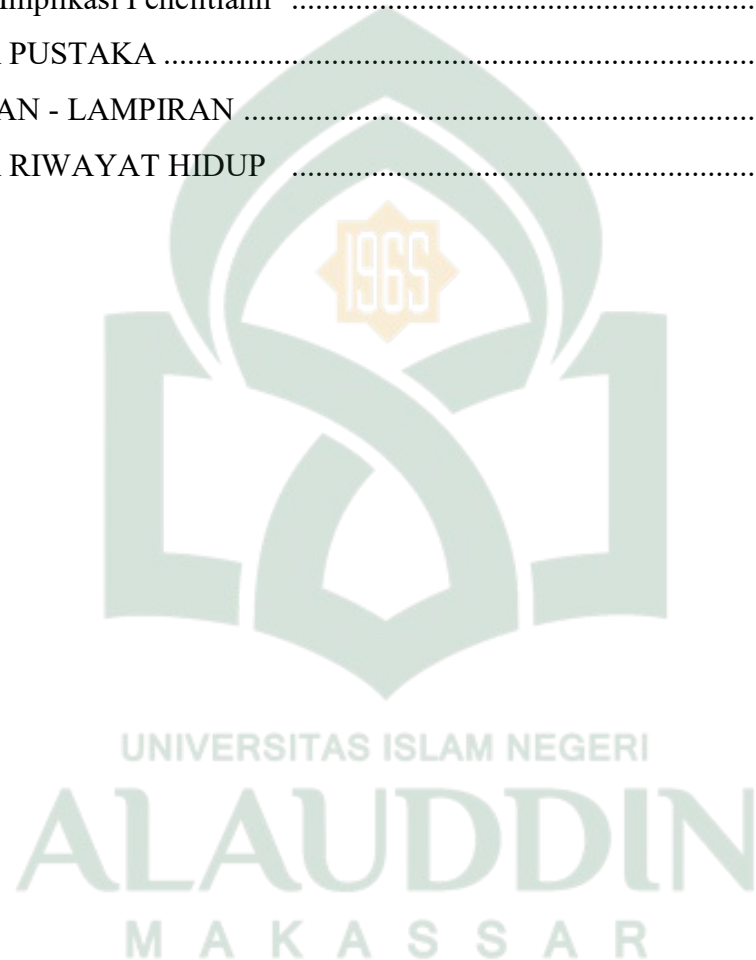
Makassar,  
Penulis

2017

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-16
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	17-30
A. Tinjauan teoritik .....	17
1. Feminisme Gender.....	17
2. Gender Dalam Implementasi Kebijakan .....	21
3. Model transformasi kebijakan Naila Kabeer.....	27
B. Kerangka Konseptual .....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	31-38
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan data .....	34
E. Analisi Data .....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39-72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39

B. Analisis gender terhadap muatan Perda Kab. Wajo No 23 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kecamatan Pammana .....	52
C. Implementasi Perda Kab. Wajo No 23 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kecamatan Pammana ditinjau dari perspektif Gender .....	62
BAB V PENUTUP .....	73-74
A. Kesimpulan .....	73
B. Implikasi Penelitiann .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN - LAMPIRAN .....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= <i>subhanahuwa ta ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- salam</i>
H	=Hijrah
M	=Masehi
SM	= SebelumMasehi
I	= LahirTahun(untuk orang yang masihhidupsaja)
W	= WafatTahun
QS.../...4	=QS al- baqarah/2:4 atau QS ali 'imran/3:4
HR	=HadisRiwayat



## **ABSTRAK**

**Nama : Sulfiana**

**NIM : 30600113125**

**Judulu : Analisis Gender Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kab. Wajo No. 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kecamatan Pammana.**

---

Penelitian ini mengkaji tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kab. Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kecamatan Pammana.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, tehnik analisis data menggunakan analisis deskriptif, pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah dalam tataran netral gender dan Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengalami hambatan dalam hal memonitoring program CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo. Namun dengan melihat konteks yang ada berdasarkan hasil dilapangan bahwa perusahaan telah melaksanakan CSR dan sudah mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan meskipun masih banyak dijumpai masyarakat yang kebingungan tentang kegiatan-kegiatan atau bantuan yang diberikan oleh PT. Energi Sengkang.

Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Pemberlakuan CSR pada perusahaan PT Energi Sengkang memiliki dampak yang baik untuk masyarakat disekitar wilayah perusahaan. Selain itu program CSR yang diberlakukan oleh perusahaan tidak memiliki dampak diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan atau biasa disebut sebagai netral gender. Program CSR sebagai kewajiban perusahaan adalah proses membantuk masyarakat mencapai kesejahteraan. 2) Berdasarkan penelitian ini harusnya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak perusahaan dalam melaksanakan program CSR.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini kebijakan publik menjadi suatu isu yang penting, terlebih karena kebijakan publik yang mestinya ditujukan untuk mengatasi masalah publik ternyata justru menyengsarakan publik, contohnya tentang kebijakan publik yang sejatinya untuk penertiban, ternyata yang terjadi justru penggusuran selain itu lahirnya beberapa kebijakan yang bias gender juga menjadi masalah di Indonesia.

Secara legal hukum pelaksanaan kesetaraan gender wajib dilakukan karena telah tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, sampai kepada Bupati ataupun Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantapan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.<sup>1</sup>

Sederhananya, dalam pembangunan nasional memunculkan implikasi bahwa setiap kementerian ataupun lembaga organisasi wajib memperhatikan analisa gender dalam setiap pengambilan kebijakan.

---

<sup>1</sup>Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004) h. 252.

Transformasi hak asasi perempuan menjadi hak asasi manusia merupakan salah satu landasan pentingnya perempuan dilibatkan dalam ruang publik dan dalam perumusan kebijakan publik, dalam Islam juga diajarkan bahwa sebagaimana laki-laki, hak-hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak perempuan, agamanya, hartanya, kehormatannya, akalanya dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam sebagaimana kaum laki-laki. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An Nisâ /4: 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ  
نَقِيرًا

Terjemahnya :

*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.<sup>2</sup>*

Selain kesamaan hak yang telah dijelaskan diatas, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan posisi perempuan dalam kerjasama dengan laki-laki dalam QS. At-Taubah /9: 71.

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung :Cv. Penerbit J-Art, 2004, h. 98.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Terjemahnya :

*dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>3</sup>

Tidak ada dikotomi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Tidak ada pembedaan dalam kasus kehambaannya dihadapan Allah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ali-Imran/3:195.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ  
هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ  
جَنَّتِ حَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرُ ثَوَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya :

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang*

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.198.

*mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.*<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

Seiring dengan budaya patriarki yang masih melekat kuat pada kultur masyarakat Indonesia sehingga budaya patriarki menyebabkan ketidakadilan gender, ketidakadilan tersebut termanifestasi dalam marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja yang tidak sesuai serta sosialisasi peran gender. Kebijakan publik masih membuka peluang sebesar-besarnya untuk terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender, kebijakan yang dihasilkan idealnya mampu mengakomodir pengalaman perempuan dan tidak membatasi hak asasi perempuan dalam mengembangkan kapasitas dirinya sebagaimana menurut Deddy Mulyadi.<sup>5</sup> Sebaik apapun substansi kebijakan publik yang dibuat jika tidak diimplementasikan dengan baik maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak kepada kepentingan masyarakat.

Arahan kebijakan pemberdayaan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan menetapkan perlunya meningkatkan kedudukan

---

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.76.

<sup>5</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti, Untuk Pelayanan Publik* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2016 ) h. 52.

dan peranan perempuan serta meningkatkan kualitas peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membicarakan wacana gender dan kebijakan publik semakin menarik ketika menyimak komposisi partisipasi perempuan dalam dunia publik berkaca dari hal itu menarik dibahas implementasi dari sebuah kebijakan publik ditinjau persepektif gender. Maraknya kritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang bias gender dan implementasi kebijakan yang bias gender di susul komposisi partisipasi perempuan dalam dunia publik yang rendah. Alasan yang digunakan adalah mensahkan posisi domestik perempuan yang sekaligus menafikkan peran publik dari perempuan termasuk peran secara langsung terlibat dalam kebijakan publik maupun proses partisipasi formulasi kebijakan publik dalam keberadaanya sebagai warganegara pendek kata kinerja kebijakan publik yang tidak sensitif gender mempunyai efek yang luar biasa dalam menciptakan pembangunan yang bias gender dan pada akhirnya adalah masyarakat Indonesia dengan ketimpangan gender yang luar biasa pula.<sup>6</sup>

Kegiatan atau program dikatakan telah responsif gender apabila kebijakan, program, kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta. Organisasi masyarakat dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan

---

<sup>6</sup>Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, DanEvaluasi*, h. 228.

tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.

Salah satu program perusahaan yang sedang gencar dilakukan saat ini adalah CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau disebut juga sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas. CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya. CSR tidak lagi berorientasi pada nilai perusahaan semata (*single bottom line*), yaitu aspek ekonomi (*profit*), melainkan harus berorientasi pada tiga pilar utama (*triple bottom lines*), yaitu aspek ekonomi (*profit*), aspek sosial (*people*), dan aspek lingkungan (*planet*) yang saling bersinergi memberdayakan masyarakat.<sup>7</sup>

Keberadaan Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan antara lain :Pertama, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

---

<sup>7</sup>Debbie Luciani Prastiwi Dan Titik Sumarti, Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT. Holcim Indonesia Tbk. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 6 no. 1 (April 2011), h. 92. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/54380/1/I12dlp.pdf> (Diakses 2 April 2017).



tanggungjawab sosial dan lingkungan. Kedua, Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”, ketiga, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 36 ayat 1 huruf d :dana yang disisikan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>8</sup>

Untuk mengelola tanggungjawab sosial perusahaan salah satu instrumen yang penting dalam melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan yaitu adanya FKTSP (Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan) keberadaan FKTSP ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Wajo adalah PT. Energi Sengkang yaitu sebuah perusahaan yang memproses gas alam menjadi sumber energi yang siap pakai khususnya sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU). PLTGU Sengkang pada Tahun 2013 telah mensuplai sumber energi listrik di Sulawesi Selatan sebesar 315 MW atau berkisar 60% sampai 85% dari kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan. Namun seiring dengan semakin pesat kemajuan PT. Energi Sengkang dari segi perluasan usaha baik itu pembukaan beberapa sumur baru dan penambahan daya PLTGU dari yang awalnya sebesar 120 MW

---

<sup>8</sup>Syandi Negara, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang”, *Skripsi*, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang, 2016. h. 3.



Kemudian dengan Pembukaan Blok II mengalami kenaikan sebesar 315 MW ini secara otomatis dapat meningkatkan profit bagi perusahaan.<sup>9</sup>

Melihat perkembangan perusahaan tersebut penting bagi setiap elemen untuk tetap memperhatikan kesesuaian tanggungjawab dari perusahaan tentang pelaksanaan CSR yang telah diatur dalam peraturan daerah supaya tetap saling menguntungkan satu sama lain sebab Islam telah mengatur bagaimana *bermuamalah*, atau bekerja sama dan bersimpati yang sesuai dengan anjuran agama Islam sebagaimana hadist yang berbunyi:

دَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى.

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdillah bin Numair; Telah menceritakan kepada kami Bapakku; Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Bisyr dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya) ' (HR. Muslim 4685).<sup>10</sup>*

Peningkatan produksi perusahaan idealnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, penting bagi pemerintah mengevaluasi

<sup>9</sup>Andi Rusmin P, dkk, "Analisis Peran Publik Relations (PR) Dalam Penanganan Opini Dan Sikap Komunitas Sekitar Terhadap Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Energy Sengkang Di Kabupaten Wajo," *Jurnal Komunikasi Kareba*, vol. 4 no 4. (Desember 2015): h. 374. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/634/453> (Diakses 12 Desember 2016).

<sup>10</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, juz 4 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 1999.

kebijakan yang telah dibuat sebagaimana menurut Francis Fukuyama.<sup>11</sup> sebuah Negara haruslah menjadi kuat dan indikator Negara yang kuat dilihat dari seberapa besar aturan yang telah dibuat itu dijalankan oleh masyarakat, ketika terlalu banyak pelanggaran aturan berarti Negara menjadi lemah. Salah satu tugas pemerintah adalah memastikan aturan atau Undang-undang betul-betul dijalankan dan ditaati oleh setiap warga Negara.

Salah satu perusahaan yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* adalah PT. Energi Sengkang. Sebagai perusahaan dalam bidang PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap), PT. Energi Sengkang, menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar seperti gangguan kesehatan yang dapat diderita masyarakat sekitar diakibatkan menghirup gas dari proses produksi perusahaan tersebut, pencemaran sungai yang diakibatkan dari limbah perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik. Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial tetapi merupakan bagian dari resiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan yang bergerak dibidang industri tenaga listrik ini yang menggunakan sumber daya alam dilingkungan masyarakat sekitar menjadikan perusahaan tersebut untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar. Hal ini akan berperan penting dalam menurunkan resiko

---

<sup>11</sup>Francis Fukuyama, Penerjemah A. Zaim Rofiqi, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan Dan Tata Dunia Abad 21*, 2005, h. 9.

adanya gangguan terhadap operasi perusahaan, misalnya klaim dari masyarakat terhadap perusahaan. Beranjak dari konsepsi ini maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan.

Dengan melihat kecenderungan yang sudah ada dilapangan bahwa kontruksi lingkungan sosial didalam masyarkat mengenai peran, posisi,tugas dan tanggun jawab yang berbeda antar laki-laki dan perempuan dibentuk pola bahwa perempuan lebih menganggap dirinya tidak perlu berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan gender dan kurang terpenuhinya hak-hak perempuan misalnya dalam bidang kesehatan status gizi perempuan masih menjadi masalah yang utama artinya bahwa kondisi perempuan belum mendapatkan perhatian yang berarti, padahal ketika melihat dampak yang dihasilkan dari produksi perusahaan yang berupa pencemaran maka hal yang terpenting mendapatkan perhatian yaitu bidang kesehatan. Pencemaran yang diakibatkan oleh perusahaan tentunya akan mudah mendatangkan penyakit khususnya bagi anak-anak yang rentang terhadap penyakit dan dampak dari hal itu perempuan yang paling terkena pengaruh, selain itu dibidang ekonomi melihat komposisi penduduk mayoritas perempuan tingkat partisipasi angkatan kerja jauh lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Perempuan dalam hal ini tidak terwakili hak-haknya dibanding laki-laki. Proyek-proyek pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat justru menjadikan perempuan semakin termarginalkan. Perempuan hany sebagai objek, bukan pelaku pembangunan.

Padahal hasil pembangunan akan lebih bermanfaat bagi perempuan jika perempuan tersebut terpenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis Pengarusutamaan gender terhadap implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Dari beberapa permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul “Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kecamatan Pammana”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang, maka berikut ini penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Netral Gender terhadap teks Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT. Energi di Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ditinjau dari perspektif Gender ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengkaji analisis Netral Gender terhadap teks Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terkait PT. Energi Di Desa Patila Kecamatan Pammana ditinjau dari perspektif Gender.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan pemahaman teoritis baik bagi penulis sendiri maupun pembaca selain itu, juga diharapkan agar bisa menjadi acuan untuk penelitian yang berbasis gender selanjutnya.
2. Manfaat Praktis: Memahami muatan dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan serta mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah tersebut ditinjau dari perspektif gender.

## E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri beberapa penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis menyebutkan lima diantara yang serupa dengan penelitian ini, yaitu :

No	Nama	Judul Penelitian	Manfaat Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Djamiah Husain Dan Suraedah Hading. <sup>12</sup>	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Sector Pendidikan	Mengaetahui Evaluasi PUG Menggunakan Analisis Gender Dengan Mengidentifikasi Masalah Perempuan Dan Laki-Laki	Kualitatif	Mengetahui pengarusutamaan gender pada sector pendidikan dibidang partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang pembangunan dan manfaat yang didapatkan dari laki-laki dan perempuan.
2.	Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. <sup>13</sup>	Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender	Memberikan informasi dalam bidang implementasi kebijakan anggaran dilihat dari perspektif gender.	Kualitatif	Menyajikan data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola anggaran dan keberhasilan implementasi

<sup>12</sup>Djamiah Husain Dan Suraedah Hading, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Sector Pendidikan," *Bunga Wellu*, vol. 14 no. 1 (2009): h. 34. <http://digilib.unm.ac.id/files/manual/bungawellu/DJAMIAH%20HUSAIN.pdf> (Diakses 2 April 2017).

<sup>13</sup>Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 11 no. 1, (Januari 2011), h. 74. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=105984&val=2287> (Diakses 2 April 2017).

					nya dilihat dari perspektif gender.
3.	Debbie Luciani Prastiwi Dan Titik Sumarti. <sup>14</sup>	Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT. Holcim Tbk	memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai konsep dan analisis gender dalam program CSR sebagai suatu upaya untuk mencapai kesetaraan gender	Kualitatif	Menyajikan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan serta tingkat keberhasilan BMT dari perspektif gender

<sup>14</sup>Debbie Luciani Prastiwi Dan Titik Sumarti, "Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Csr Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT. Holcim Indonesia Tbk," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 6 no. 1 (April 2011), h. 92. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/54380/1/I12dlp.pdf> (Diakses 2april 2017).



4.	Hikma Abd.Hakim. <sup>15</sup>	Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Di Kabupaten Morowali Utara	Memberi informasi dan masukan terhadap pihak yang terkait pada perda nomor 5 tahun 2010 tentang tanggungjawab sosial perusahaan di kota Serang, sehingga perda tersebut berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya.	Kualitatif	Hasil penelitian memberikan informasi mengenai berbagai permasalahan dalam implementasi perda,
5.	Nur Awaliah Mahdi <sup>16</sup>	Politik Lingkungan (Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Semen Tonasa)	Mengetahui sejauh mana pengelolaan lingkungan hidup di PT. Semen tonasa dan Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Semen Tonasa.	Kualitatif	PT. Semen Tonasa mempunyai program CSR yaitu Tonasa Mandiri, Tonasa Cerdas, Tonasa Hijau dan Tonasa Bersahaja dimana diwujudkan dalam berbagai

<sup>15</sup>Hikma Abd.Hakim S, "Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Di Kabupaten Morowali Utara", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin. 2015. h. ii.

<sup>16</sup>Nur Awaliah Mahdi, "Politik Lingkungan (Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Semen Tonasa)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2012. h. ii.



					program peningkatan kesejahteraan
6.	Sulfiana	Gender dan Kebijakan Publik (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan ditinjau dari persepektif Gender)	Mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan perda ditinjau dari perspektif gender	Kualitatif	Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu mengetahui pengarusutamaan Gender dalam mengimplementasikan PERDA Kab. Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Teoritik

Herbert Blumer sebagaimana dikutip Abudin Nata mengatakan bahwa teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antar gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, mengimpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.<sup>17</sup>

##### 1. Teori Feminisme Gender

Feminisme berasal dari kata latin yaitu *Femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia. Operasionalisasi upaya pembebasan diri kaum perempuan dari berbagai

---

<sup>17</sup>Abudin Nata. *Metodologi Studi Islam* (PT. Raja Grafindo Persada 2004). h. 184-185

ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan feminis.<sup>18</sup>

Esensi gerakan feminisme adalah agar perjuangan perempuan dan laki-laki tidak didiskriminasi dalam bidang kehidupan. Kita memang berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Berbagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki berpengaruh terhadap perilaku dan cara mengambil keputusan, implikasi dari dasar perbedaan adalah perbedaan biologis tersebut tidak seluruhnya dapat dihayati makna dan kepentingannya oleh seks yang lain. Namun, kenyataan itu sebenarnya menunjukkan bahwa keadaan jasmani berpengaruh pada keadaan sehari-hari. Meski keadaan biologis sering disalahinterpretasikan sifat dan fungsi jasmani perempuan dan laki-laki perlu juga dipahami jika kita ingin dimengerti tentang perilaku dan karakter perempuan dan laki-laki.<sup>19</sup>

Feminisme tidak dapat melepaskan dirinya dari konteks politik. Feminisme memang bertabiat politis mengingat selalu menggugat struktur interaksi kekuasaan di antara perempuan dan laki-laki. Dibalik majemuknya aliran-aliran pemikiran tentang feminis yang ada ternyata, ada homogenitas pemikiran di antara mereka tidak ada yang tidak mempertanyakan hubungan dominasi dan subordinasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini

---

<sup>18</sup>Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamannya Di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 30.

<sup>19</sup>Saparinah Sadli, *Berbeda Tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2010) h. 26.

ke-“laki-laki”-an dan ke”perempuan”-an tidak boleh dipahami secara biologis, yakni sebagai jenis kelamin (*seks*) melainkan sebagai konstruksi kultural, yang lebih sering dikenal dengan sebutan Gender.

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata Gender dan seks (jenis kelamin). Kementerian EPW.<sup>20</sup> Mendefinisikan gender sebagai hubungan dalam bentuk pembagian kerja serta alokasi peran, kedudukan, dan tanggungjawab serta kewajiban, dan pola hubungan yang berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antar budaya.

Gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Seks atau jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri biologisnya. Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan namun dalam konteks sosio-kultural.<sup>21</sup>

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.<sup>22</sup> Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women’s Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural

---

<sup>20</sup>Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi Dan Kepentingan* (Cet I; Gowa : Laboratorium Ilmu Politik, 2015), h. 212.

<sup>21</sup>Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, h. 257.

<sup>22</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 34.

yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Perdebatan mengenai konsep gender masih terus berlangsung, meski beberapa tahun terakhir tidak terlalu massif seperti ketika awal-awal reformasi, yakni apakah gender itu karena alam atau sosialisasi. Menurut Ratna Megawangi terdapat dua argumen yang saling bertentangan mengenai pembentukan sifat maskulin dan feminin pada pria dan wanita.<sup>24</sup> *Pertama*, percaya bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin ada hubungannya dengan, bahkan tidak lepas dari pengaruh perbedaan biologis pria dan wanita. Perbedaan biologis pria dan wanita adalah alami, begitu pula sifat maskulin dan feminin yang dibentuknya. *Kedua*, pembentukan sifat maskulin dan feminin bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis antara pria dan wanita, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturalisasi. Mereka tidak mengakui adanya sifat alami maskulin dan sifat alami feminin (*nature*), tetapi

---

<sup>23</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*. (Cet. I; Jakarta: Gradedia Pustaka Utama, 2004), h. 4.

<sup>24</sup>Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi Dan Kepentingan*, h. 213.

yang ada adalah sifat maskulin dan feminin yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi (*nature*). Argumen ini membedakan antara jenis kelamin (*seks*) yang merupakan konsep *nature* dan gender yang merupakan konsep *nurture*

a. Konsep kesetaraan gender

Kesetaraan gender kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak asasi dan potensinya bagi pembangunan disegala bidang kehidupan. Defenisi dari USAID menyebutkan bahwa *Gender Equality* (kesetaraan gender) memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-hak sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan sumber daya, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.<sup>25</sup>

2. Gender Dalam Implementasi Kebijakan

a) Pengertian kebijakan

Menurut Dunn<sup>26</sup> kebijakan didefinisikan dari asal katanya, secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sansakerta, dan Latin akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansakerta yaitu polis (negara-kota) dan pur (kota) dan memiliki arti suatu pedoman dasar

---

<sup>25</sup>Puspitawati, H. *Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia* (Bogor, PT Penerbit IPB Press, 2012). h. 52.

<sup>26</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Public* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005). h. 51 .

atau rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang menyangkut negaradan kota. Sedangkan Hogwood dan Gun dalam Wicaksana<sup>27</sup>, menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern diantaranya :

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas. Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industri, atau kebijakan hokum dan ketertiban.
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan. Contohnya : untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pengembangan demokrasi melalui desentralisasi.
3. Sebagai proposal spesifik. Contohnya : membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar.
4. Sebagai keputusan pemerintah. Contonya :keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan dewan perwakilan rakyat atau presiden.
5. Sebagai otoritasi formal. Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya.

---

<sup>27</sup>Kristian Wicaksono, *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). h. 53.

6. Sebagai sebuah program. Contohnya : sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan , seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan.
7. Sebagai output. Contohnya: apa yang secara actual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang didistribusikan dalam program reformasi agrarian dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya.
8. Sebagai hasil. Contohnya : apa yang secara actual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petanidan standar hidup dan output agricultural dari program reformasi agrarian.
9. Sebagai teori atau model. Contohnya : apabila kamu melakukan maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industry manufaktur, maka output industry akan berkembang.
10. Sebagai sebuah proses. Sebagai proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di setting , pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.

Dari teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman dasar atau rangkaian proses dan asas dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok



sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan.

b) Analisis kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisa yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap.<sup>28</sup>

1) Bentuk-bentuk analisis kebijakan

Menurut Dunn ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integrative.<sup>29</sup>

a. Analisis kebijakan prospektif

Adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang akan terjadi sebelum kebijaksanaan diterapkan.

---

<sup>28</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Public* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005). h. 95-96.

<sup>29</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. h. 117

Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali menerapkan teknik peramalan untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul terhadap suatu kebijakan yang diusulkan.

b. Analisis kebijakan retrospektif

Adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah diimplementasikan model ini biasa disebut sebagai model evaluative karena banyak melibatkan pendekatan evaluative terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

c. Analisis kebijakan yang terintegrasi

Adalah model perpaduan antara kedua model yang tersebut sebelumnya. Model ini lazim disebut model komprehensif atau holistik. Pada model ini analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan diberlakukan. Model ini melibatkan teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

c) Pengertian Implementasi kebijakan

Pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn.<sup>30</sup> mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier.<sup>31</sup> mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

---

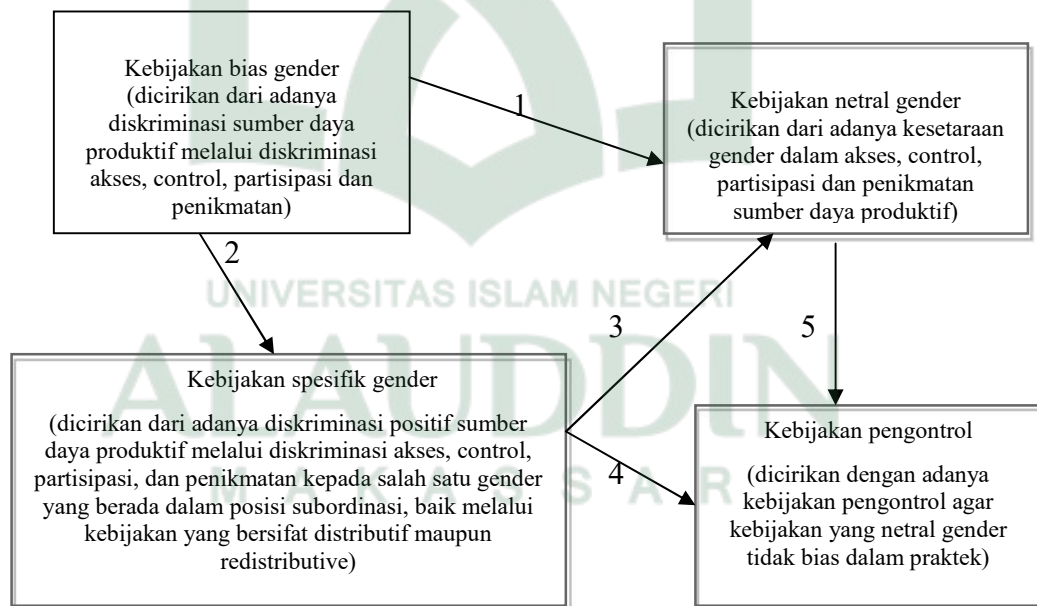
<sup>30</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses* (Jakarta; PT. Buku Kita, 2008), h. 146-147.

<sup>31</sup>Abdul Wahab Solihin, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakasanaan Negara* (Cet II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 65.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

### 3. Model dan tranformasi kebijakan Naila kabeer.

Model ini diambil dari Riant Nugroho.<sup>32</sup> yang diadopsi Dari model review kebijakan dari Naila Kabeer sebagai berikut :



Penjelasan sebagai berikut bahwa pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai adalah kebijakan yang netral gender yang dicirikan dari adanya

<sup>32</sup>Riant Nugroho D, Kebijakan Publik: *Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, h. 255.

kesetaraan gender dalam akses, kontrol, partisipasi, dan penikmatan sumber produktif yang tersedia didalam masyarakat. Pada kondisi awal, kesetaraan gender tidak tercapai karena ada kebijakan-kebijakan yang bias gender. Kebijakan ini dicirikan dari adanya diskriminasi sumber daya produktif melalui diskriminasi akses, kontrol, partisipasi, dan penikmatan diantara jenis gender (dalam hal ini laki-laki atau laki dan perempuan-perempuan). Kebijakan ini dapat ditransformasikan secara langsung menjadi kebijakan yang netral gender (langkah 1), ataupun melalui pembentukan kebijakan spesifik gender (langkah 2) untuk mentransformasikan kebijakan yang ada menjadi netral gender (langkah 3). Namun demikian, pada akhirnya harus ada kebijakan pengontrol kebijakan yang netral gender tersebut untuk meminimalisir bias implementasi dari kebijakan yang netral gender tersebut (langkah 5) yang secara efektif dilakukan dengan mempertahankan maupun menyempurnakan kebijakan spesifik gender (langkah 4).<sup>33</sup>

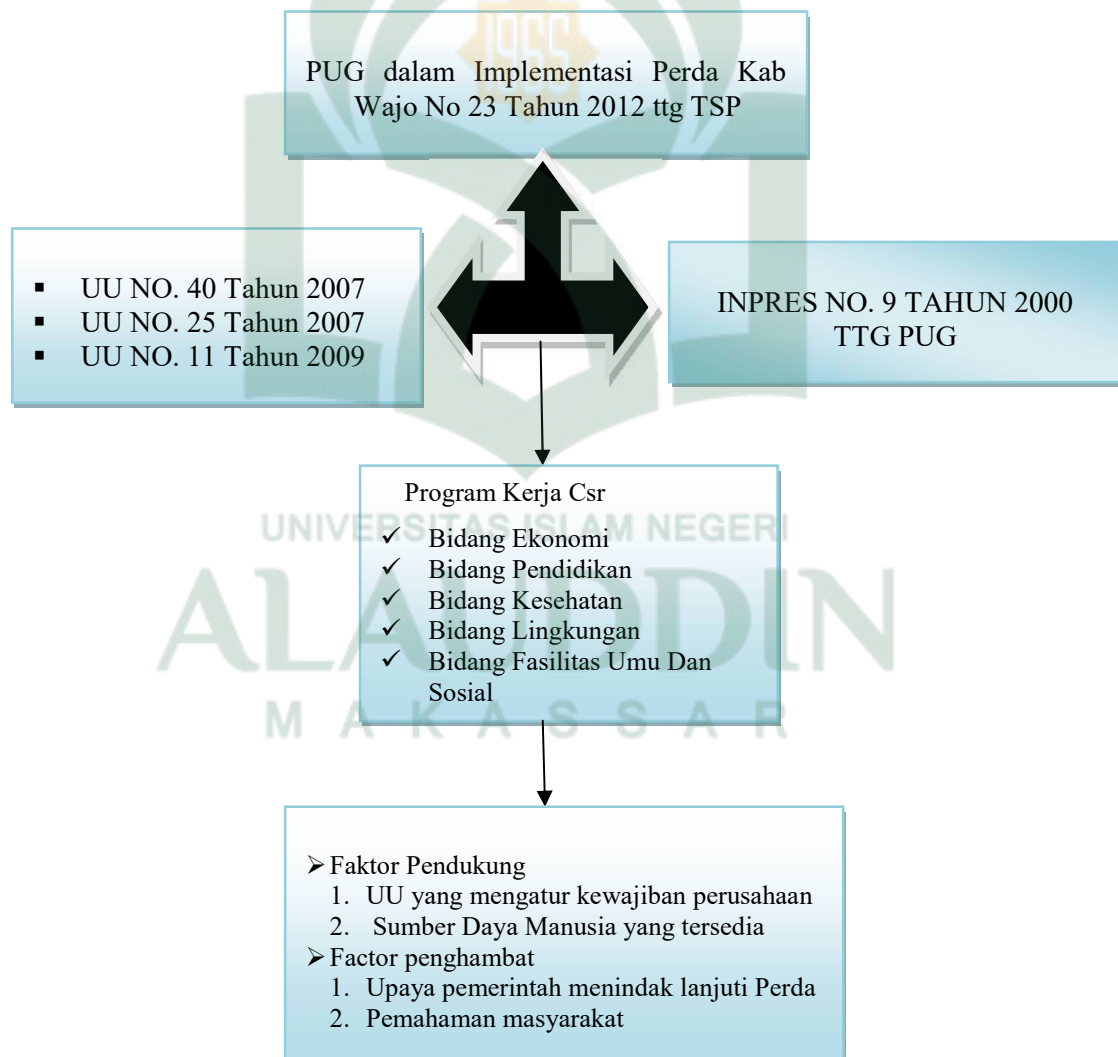
1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.

---

<sup>33</sup>Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, h. 255.

3. kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan control atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya sumber daya atau pembangunan secara sama atau setara.

## B. Kerangka Konseptual



Penelitian ini menganalisis Konsep Pengarusutamaan gender dalam implementasi Peraturan Daerah Kab. Wajo No 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan pada salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo kecamatan Pammana Desa Patila.

CSR merupakan bentuk tanggung Jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan, dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan dimana dalam Peraturan Daerah Kab. Wajo No 23 Tahun 2012 bahwa CSR ini dilaksanakan guna pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut pasal 12 menyatakan bidang kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ada 5 bidang kegiatan, akan tetapi terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi implementasi CSR di Kabupaten Wajo meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yakni belum ada upaya pemerintah daerah dalam menindak lanjuti Perda sehingga forum yang bertugas memonitoring program CSR serta yang melaporkan CSR belum terbentuk sehingga CSR berjalan sendiri-sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah selain itu juga pemahaman masyarakat yang masih kurang, sedangkan faktor pendukung adalah adanya undang-undang yang mengatur kewajiban perusahaan serta sumber daya manusia yang tersedia.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.<sup>34</sup> Yaitu terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terkait PT. Energi Di Desa Patila Kecamatan Pammana ditinjau dari perspektif Gender. Pada umumnya diakui bahwa penelitian kualitatif member kesempatan ekspresi dan penjelasan lebih besar.<sup>35</sup>

##### B. Lokasi penelitian

Penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan mengambil objek lokasi penelitian di Desa Patila. Desa tersebut lokasi berdirinya perusahaan PT. Energi dan salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah perempuan.

---

<sup>34</sup>Lisa,Harrison. *Metodologi Penelitian Politik* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 102.

<sup>35</sup>Lisa,Harrison. *Metodologi Penelitian Politik* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 86.



### C. Jenis Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data sekunder dan data primer.<sup>36</sup>

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari kergaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilihpun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian dilapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti juga menggunakan teknik snowball disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada dilapangan.

Pemilihan informan didasarkan atas pertimbangan bahwa semua informan bersentuhan langsung dengan program CSR yang dilaksanakan

---

<sup>36</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004). h. 76.

oleh pihak PT. Energy Sengkang baik itu, pelaksana dalam hal ini PT. Energy Sengkang yang merasakan dampak dari keberadaan perusahaan beserta program CSR yang ditawarkan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Ketua Komisi III DPRD Kab. Wajo : 1 orang
  2. Kepala bidang pembangunan Camat Pammana : 1 orang
  3. Kepala Desa Patila, : 1 orang
  4. Sekretaris Desa Patila : 1 orang
  5. Tim penggerak PKK : 1 orang
  6. Kader Posyandu : 2 orang
  7. Masyarakat Desa Patila : 3 orang
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan seperti buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. sumber data diharapkan dapat membantu mengungkap data yang diharapkan. Peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder.<sup>37</sup>

Kedua data tersebut akan membantu peneliti menganalisis secara kualitatif kemudian diinterpretasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

---

<sup>37</sup>Mudrarajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, h. 148.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Library research* yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.
  - b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.
2. *Field research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara yakni observasi dan wawancara.
  - 1) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.<sup>38</sup> Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk

---

<sup>38</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*. h. 115

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta di bantu dengan panca indra lainnya. Jadi observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>39</sup>

Secara garis besar ada tiga macam pedoman wawancara yaitu sebagai berikut :

### 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur

Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.

### 2). Pedoman wawancara terstruktur

---

<sup>39</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 108.

Pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda (*check*) pada nomor yang sesuai.<sup>40</sup>

### 3). Wawancara mendalam (*indept interview*)

Teknik pengolahan data yang pengumpulan datanya didasarkan pada percakapan secara intensif dengan satu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai mengenai apa yang sedang diteliti.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi adalah hasil rapat.

---

<sup>40</sup>Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian* (Cet. III; Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 131

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, ada tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni:

### a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

### b) Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

### c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.





## BAB IV

### ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, dan batas-batas serta sektor yang berhubungan dengan judul

##### 1. Gambaran Kabupaten Wajo

###### a. Keadaan Geografis

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kotanya Sengkang, dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo terletak antara  $3^{\circ}39''$  lintang selatan dan  $119^{\circ}53''$  -  $120^{\circ}27''$  bujur timur. Luas Wilayah Kabupaten Wajo  $\pm 2.506,19 \text{ km}^2$  (250.619 Ha) atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Kab. Luwu dan Kab. Sidenreng Rappang
Sebelah Timur	: Teluk Bone
Sebelah Selatan	: Kab. Soppeng dan Kab. Bone

Sebelah Barat : Kab. Soppeng dan Kab. Sidrap

Dalam hal pembagian wilayah administratif, pada tahun 2007 Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 Kecamatan, yang di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Luas Daerah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	% Terhadap Luas Kabupaten
1	Sabbangparu	137.75	5.3
2	Tempe	38.27	1.53
3	Pammana	162.1	66.47
4	Bola	220.13	8.78
5	Takkalalla	179.76	7.17
6	Sajoanging	167.01	6.66
7	Penrang	154.9	6.18
8	Majauleng	225.92	9.01
9	Tanasitolo	154.6	6.17
10	Belawa	172.3	6.88
11	Maniangpajo	175.96	7.02
12	Gilireng	147	5.87
13	Keera	368.36	14.7
14	Pitumpanua	207.13	8.26
<b>Kabupaten Wajo</b>		<b>2.506.19</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Secara keseluruhan terbentuk 48 wilayah yang berstatus kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus desa. Kecamatan Kera merupakan kecamatan

terluas dengan luas wilayah  $368.36 \text{ km}^2$ , sedangkan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah  $38.27 \text{ km}^2$ .

Sebagaimana lazimnya yang terjadi di sebagian besar daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang tak luput dari perkembangan segala aspek, termasuk dalam perkembangan dalam wilayah kabupaten, bahwa penggunaan lahan untuk pekarangan atau lahan bangunan dan halaman sekitarnya selalu mengalami perluasan. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Wajo yang pada saat ini luas lahan bangunan yang sudah mencapai 12,036 Hektar atau 15 % dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Wajo.

Fenomena ini terkait dengan potensi daerah serta didukung oleh letak geografisnya yang strategis di Sulawesi Selatan dan juga terkenal dengan julukan Kota Dagang yang secara jelas akan menentukan terhadap meluasnya penggunaan lahan untuk pemukiman.

#### b. Keadaan Alam dan Iklim

Karakteristik dan potensi lahan Kabupaten Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring dengan posisi “*Mangkalungu ribulu`e, Massulappe Ripottanangng`e, Mattodang Ritasi`e*” yang artinya Kabupaten Wajo memiliki tiga dimensi utama, yaitu :

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke Utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah

hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente, serta pengembangan ternak.

2. Tanah daratan rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah, dan barat.
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone. Disebelah timur merupakan wilayah potensial yang digunakan untuk pengembangan perikanan budi daya tambak. Selain itu Kabupaten Wajo juga mempunyai potensi sumber air yang cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan yang terdapat di sungai-sungai besar (Sungai bila, Walennae, Gilireng, dan Awo) yang ada. Sungai ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan dan penyediaan air bersih.

Dari luas wilayah Kabupaten Wajo 2.506,19 km<sup>2</sup>, penggunaan untuk sawah 86.142 hektar (34,37%) dan 164.477 hektar (65,63%) lainnya adalah lahan kering (non-sawah). Data Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk pertanian di Kabupaten Wajo, terbesar kedua setelah Kabupaten Bone. Dari keseluruhan luas lahan sawah, mayoritas sawah diairi secara tadah hujan (65.083 hektar), sedangkan sisanya adalah pengairan teknis (7.950 hektar), dan pengairan setengah teknis (587 hektar). Untuk lahan kering, penggunaan terbesar adalah untuk tanah tegal, kebun, ladang

dan huma (52.935 hektar), sisanya adalah lahan perkebunan (25.414 hektar), penggembalaan /padang rumput 13.414 hektar (8,16%), pekarangan beserta tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya 12.036 hektar (7.32%), tambak 10.203 hektar (6.21%), tanah tanaman kayu-kayuan hutan rakyat 9.048 hektar (5.51%), hutan negara 8.868 hektar (5.40%), tanah yang sementara tidak digunakan 6.068 hektar (3.69%), rawa-rawa yang tidak ditanami 3.389 hektar (2.06%), kolam/tebat/empang 1.740 hektar (1.06%), dan 21.207 hektar digunakan untuk berbagai kepentingan lainnya.

c. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan

1. Penduduk

Keadaan penduduk Kabupaten Wajo berdasarkan data tahun 2008 dari Kantor Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum berjumlah 383.504 orang. Penduduk yang paling padat terletak di Kecamatan Tempe yang merupakan tempat ibu kota kabupaten dengan jumlah 62.038 jiwa dan daerah yang jumlah penduduknya dengan jumlah yang sedikit dibandingkan daerah lain terdapat di Kecamatan Gilireng dengan jumlah 11.074 jiwa.

2. Ketenagakerjaan

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat membutuhkan langkah strategic dalam pemenuhannya, substansi penting dalam hal itu adalah pekerjaan yang menjadi jaminan

akan pemenuhan kebutuhan hidup. Pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

d. Sektor Dalam Perekonomian

1. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Wajo yang semakin diperhatikan saat ini dengan dikembangkannya Kabupaten Wajo sebagai kota gas, yang terbukti dengan semakin dikembangkannya tambang gas bumi di Kecamatan Gilireng dan di Kecamatan Pammana di Desa Patila yang digunakan sebagai pembangkit listrik di Kabupaten Wajo dan disebahagian wilayah di Sulawesi Selatan.

2. Sektor Industri

Pengembangan industry di wilayah Kabupaten Wajo merupakan sektor penting untuk dikembangkan. Salah satunya adalah sektor industri persuteraan alam dan pertenunan, serta meubel kayu yang merupakan komoditi andalan sektor industri. Sektor industri pertenunan sutera khususnya sangat potensial untuk dikembangkan, kegiatan ini merupakan pekerjaan turun temurun disebahagian masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian pokoknya, terutama masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tanasitolo yang merupakan pusat industri sutera di Kabupaten Wajo. Hal ini disebabkan karena mereka sudah

turun temurun menjadikan pekerjaan ini sebagai penopang kehidupan mereka. Tempat yang strategis ditopang dengan tingkat pengetahuan yang sudah turun temurun diajarkan mengakibatkan wilayah ini dijadikan pusat perindustrian sutera di Kabupaten Wajo. Dengan perkembangan sektor industri sutera diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

## 2. Gambaran umum Desa Patila

Desa patila yang sebelumnya bernama desa persiapan patila merupakan pemekaran dari dua desa definitif yang ada di wilayah pammana yaitu desa pammana dan desa lempa. Namanya patila diambil dari lontara bugis yang artinya pammase (rahmat), desa patila pada masa terbentuknya terdiri atas dua dusun yang yaitu dusun patila dan dusun Bulu Patila.

Dusun patila merupakan bagian dari desa lempa akan tetapi mengalami pemekaran sehingga terbentuklah dusun patila kemudian berubah menjadi desa patila.

### 1. Kondisi Geografis

Desa Patila secara administratif merupakan salah satu Desa dari 13 (Tiga Belas) Desa dan 2 (Dua) kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Pammana,

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa lampulung



- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cina dan Pammana
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lapaukke
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lempa dan Simpursia

Desa Patila memiliki luas wilayah 16,71 Km dari luas Kecamatan Pammana yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun, Sebagaimana wilayah tropis Desa Patila mengalami musim kemarau dan musim penghujan setiap tahunnya.

Jarak Pusat Desa dengan ibukota Kabupaten yang sapat ditempuh melalui perjalanan darat  $\pm 10$  Km dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor  $\pm 30$  Menit, Sedangkan jarak pusat desa dengan ibukota kecamatan  $\pm 2$  Km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor  $\pm 5$  Menit

Luas wilayah Desa Patila dirinci menurut penggunaan lahan/tanah dapat kami uraikan dalam tabel berikut :

**TABEL 1.2**  
**LUAS PENGGUNAAN LAHAN<sup>41</sup>**

No	Uraian Lahan	Luas	Satuan	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Tanah Bangunan</b>			
1.	Perkantoran	0,50	Ha	
2.	Sekolah	2,00	Ha	
3.	Sarana Kesehatan	0,50	Ha	
4.	Tempat ibadah (Masjid)	2,00	Ha	
5.	Kuburan	2,00	Ha	
6.	Jalan	8,5	Km	

<sup>41</sup>Dokumen RPJM Desa Patila tahun 2015-2020

7.	Pemukiman	32	Ha	
<b>B.</b>	<b>Tanah Pertanian</b>			
1.	Sawah Tadah Hujan	576	Ha	
2.	Sawah Irigasi	279	Ha	
<b>C.</b>	<b>Perkebunan</b>			
1.	Kebun Rakyat	479	Ha	
<b>D.</b>	<b>Rekreasi dan Olah Raga</b>			
1.	Lapangan Bola	2,50	Ha	
2.	Lapangan Bola Volly	0,25	Ha	
3.	Lapangan Sepak Takraw	0,25	Ha	
<b>E.</b>	<b>Padang</b>			
1.	Tanah Kritis/Lahan Tandus	816	Ha	
<b>F.</b>	<b>Perikanan Darat</b>	816	Ha	

Berdasarkan dari aspek topografi, Desa Patila terletak pada ketinggian dari permukaan laut berkisar  $< 500$  m dari permukaan laut (dpl). Jenis iklim yang ada di Desa Patila adalah Iklim Tropis dan mengalami 3 (tiga) fase musim cuaca yakni musim penghujan, musim kemarau dan pancaroba. Adapun Desa Patila secara administratif terdiri dari 2 (Dua) Dusun, yaitu :

- 1) Dusun Patila
- 2) Dusun Bulu Patila

## 2. Gambaran Umum Demografis

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama jumlah, struktur dan perkembangannya.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Patila sebanyak 1.584 jiwa, terdiri dari 754 jiwa Laki-laki dan 830 jiwa Perempuan, dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

**TABEL 1.3**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA PATILA<sup>42</sup>**

Jenis Kelamin	Dusun Patila	Dusun Bulu Patila	Jumlah
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	$e=a+b+c+d$
Laki-Laki	738	454	1.192
Perempuan	775	603	1.378
Jumlah Jiwa	<b>1.513</b>	<b>1.057</b>	<b>2.570</b>

b. Keagamaan Penduduk

Kualitas keimanan dan ketaqwaan suatu masyarakat salah satunya di tandai dengan tersedianya sarana dan prasarana ibadah yang cukup refresentatif. Demikian halnya dengan masyarakat Desa Patila tingkat pemahaman dan keimanan serta ketaqwaannya cukup baik, hal ini di tunjang dengan ketersediaan fasilitas tempat ibadah berupa masjid sebanyak 3 (tiga) unit di masing-masing dusun 1 (satu) unit Mushallah. Dan menurut sepengetahuan kami Penduduk Desa Patila semua memeluk Agama Islam.

c. Keadaan Sosial

---

<sup>42</sup>Dokumen RPJM Desa Patila tahun 2015-2020

Untuk sektor pendidikan permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat Desa Patila adalah faktor dana yang terbatas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian halnya dengan angka tingkat putus sekolah masih ada. Kondisi ini tentunya berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Patila. Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Patila dapat kami gambarkan sesuai yang tercantum dalam RPJM Desa Patila sehingga gambaran tersebut merupakan kondisi awal kepemimpinan kami, karena keterbatasan data dan sumber daya manusia kami belum maksimal melaporkan kondisi terkini mengenai data akurat tingkat pendidikan penduduk Desa Patila, adapun gambarnya sebagai berikut :

**TABEL 1.4**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA PATILA<sup>43</sup>**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	Belum Sekolah	222	Jiwa
2	Tidak tamat SD	131	Jiwa
3	SD/Sederajat	885	Jiwa
4	SMP/Sederajat	560	Jiwa
5	SMA/Sederajat	651	Jiwa
6	Diploma/Sarjana	121	Jiwa

---

<sup>43</sup>Dokumen RPJM Desa Patila tahun 2015-2020

d. Kondisi Ekonomi

Sektor pertanian adalah mata pencaharian terbanyak penduduk Desa Patila. Meskipun sebagian besar areal pertanian masih bergantung pada tadah hujan seluas 436 ha, sehingga hasil pertanian (panen) kadang tidak menentu. Namun demikian sebagaimana tergambar dari data dari BPS Kabupaten Wajo Tahun 2013, luas sawah yang diusahakan untuk bidang pertanian dan dapat dipanen 1 (satu) kali setahun menurut jenis pengairan (tadah hujan) keadaan akhir tahun 2013 sebanyak 728,83 ha dengan prediksi luas tanam sejumlah 1.230 ha, luas panen sejumlah 815 ha dan tingkat produksi sebanyak 4.075 ton.

3. Gambaran umum perusahaan

Sebagai penghasil gas terbesar di Sul-Sel. Kabupaten Wajo dengan Luas 2.506,19 Km<sup>2</sup> memiliki wilayah kerja pertambangan yang disebut Blok Sengkang dengan Luas  $\pm$  24,54 Km<sup>2</sup>, sedangkan luas Wilayah Kuasa Pertambangan ( WKP Blok Sengkang ) meliputi beberapa kabupaten tetangga adalah seluas 1.825.997 Km<sup>2</sup>. Sesuai data yang ada, dimana cadangan Gas Alam Kab. Wajo diperkirakan sekitar 600 Milyar Standar Kaki Kubic (BSCF) yang terletak di desa Kampung Baru Kecamatan Gilireng dan patila kecamatan pammana.

Pada tahun 1981 dilakukan ekspolorasi pada 14 titik lokasi yang menghasilkan gas hanya 9 sumur dengan Kedalaman rata-rata antara 2500-

4000 kaki. Selain dari beberapa hal yang diungkapkan di atas Kabupaten Wajo juga terkenal dengan daerah penghasil gas alam terbesar di Sulawesi Selatan dan sekaligus penyangga kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan. Berdasarkan dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 19 sumur gas di kabupaten ini, 3 diantaranya saat ini telah dikelola oleh PT. Energi Equity Epic Sengkang (PTEEES) dengan wilayah kerja Blok Sengkang. Wilayah kerja tersebut dikelola oleh PT. Energi Equity Epic Sengkang (PTEEES) sejak tahun 1970 dan telah diperpanjang hingga tahun 2020 oleh pemerintah pusat. Sumur tersebut terdapat di Kampung Baru Desa Poleonro, Jl. Poros Palopo Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Gas yang diproduksi dari lapangan Kampung Baru tersebut kemudian dijual kepada pembangkit listrik Combine Sytle (PLTGU) PT. Energi Sengkang (PTES) yang berada di Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo untuk konsumsi daya sebesar 375 MW. Selain itu PT. Energi Equity Epic Sengkang (PTEEES) juga memasok kebutuhan gas untuk pembangkit yang dioperasikan oleh PT. Consolidated Electric Power Asia (PT. CEPA) yang juga berlokasi di Desa Patila.

PT. Energi Sengkang yaitu sebuah perusahaan yang memproses gas alam menjadi sumber energi yang siap pakai khususnya sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU). Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) ini terletak didesa Patila Kecamatan Pammana kabupaten Wajo berjarak 28 Km dari sumber pengeboran di Kampung Baru Kecamatan

Gilireng atau kurang lebih 10 Km dari pusat kota Sengkang. PLTGU Sengkang pada Tahun 2013 telah mensuplai sumber energi listrik di Sulawesi Selatan sebesar 315 MW atau berkisar 60% sampai 85% dari kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan.

**B. Analisis gender terhadap muatan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Menurut UUD 1945 secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti pada pasal 27 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya perempuan masih banyak mengalami diskriminasi dengan kata lain kedudukan perempuan secara *de jure* jauh berbeda dengan kedudukannya secara *de facto*.<sup>44</sup>

Sebenarnya kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*convention on the political rights of women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Political*

---

<sup>44</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). h. 257.



*Elimination Against Women* atau CEDAW).<sup>45</sup> Tapi tidak juga menutup kemungkinan masih terdapat peraturan daerah yang bias gender seperti yang dikutip dalam buku Riant Nugroho. Temuan dari departemen kehakiman menyebutkan terdapat undang-undang ditengarai mempunyai bias gender salah satunya dalam bidang politik yaitu.

Dalam ketentuan tentang parpol (UU No. 2/ 1999) belum memposisikan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pendidikan politik terutama dalam mengisi jabatan-jabatan diorganisasi politik (pasal 7 ayat 1).<sup>46</sup>

Gagasan tersebut diatas menjadikan acuan untuk tetap mengecek suatu peraturan daerah telah mempertimbangkan pengarusutamaan gender atau masih mengesampingkan kepentingan gender dalam merumuskan peraturan daerah tersebut. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus untuk identifikasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bab IV Pasal 12 Program Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan terdiri dari bidang kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang ekonomi terdiri dari kegiatan :

---

<sup>45</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 257.

<sup>46</sup>Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 220.

1. Peningkatan pendapatan.
  2. Pelatihan dan keterampilan produk rumah tangga.
  3. Bantuan peternakan, perikanan, pertanian, konveksi dan lain-lain.
  4. Peningkatan pendapatan melalui ketenagakerjaan.
- b. Bidang pendidikan dan kebudayaan terdiri dari kegiatan :
1. Pengembangan sarana pendidikan.
  2. Pengembangan nilai-nilai lokal.
  3. Beasiswa pendidikan.
  4. Peningkatan tenaga guru/pendidik.
  5. Olahraga dan seni.
- c. Bidang kesehatan terdiri dari kegiatan :
1. Kesehatan terpadu.
  2. Bantuan sarana dan prasarana air bersih.
  3. Keterampilan tenaga medis/ kesehatan.
- d. Bidang lingkungan terdiri dari kegiatan:
1. Reklamasi pantai dan penanaman bakau.
  2. Pengelolaan sampah rumah tangga.
  3. Hubungan masyarakat dengan kesadaran lingkungan.
- e. Bidang fasilitas umum dan sosial terdiri dari kegiatan :
1. Infrastruktur berupa jalan dan jembatan.
  2. Pengembangan sarana MCK.

### 3. Panti asuhan.<sup>47</sup>

Dari program di atas secara umum dapat dilihat bahwa program tersebut telah memperhatikan kesejahteraan baik laki-laki dan perempuan, tentunya dengan memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan maka program di atas sudah bisa dinilai ideal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setiap perumusan peraturan daerah haruslah mempertimbangkan kepentingan seluruh aspek masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dalam perumusan peraturan daerah Nomor 23 tahun 2012 komposisi perumus undang-undang tersebut tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan faktanya adalah komisi yang bertugas merumuskan peraturan daerah (perda) tersebut lebih didominasi oleh pihak laki-laki akan tetapi dalam mempertimbangkan kepentingan perempuan dalam peraturan daerah (perda) komposisi laki-laki yang lebih dominan bukan berarti peraturan daerah (perda) tersebut akan mendiskriminasi pihak perempuan. Proses pembuatan peraturan daerah membuktikan bahwa kepentingan perempuan tidaklah mesti harus disuarakan oleh perempuan pula. Peneliti menilai bahwa meskipun dalam pembuatan peraturan daerah (perda) lebih didominasi oleh pihak laki-laki indikasi diskriminasi gender tidak didapatkan dalam peraturan daerah (perda) tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang

---

<sup>47</sup>Perda Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bab IV Pasal 12.

dilakukan oleh peneliti dengan ketua komisi perumusan perda Nomor 23 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

“Dalam pembuatan peraturan daerah sudah mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan oleh karena itu dari pihak kami menganggap seluruh program yang termuat dalam peraturan daerah (perda) tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Semua kepentingan sudah dimuat dalam perda dan tidak ada pihak yang dirugikan”<sup>48</sup>

Terbentuknya peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR sebenarnya adalah bentuk implementasi undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan berjalannya CSR dari perusahaan. Sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Pembentukan CSR pada prinsipnya adalah bentuk dari implementasi dari anggota dewan yang menilai harus ada aturan terkait CSR yang dijalankan oleh setiap perusahaan.”<sup>49</sup>

Dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan sebenarnya pihak perusahaan PT. Energi Sengkang secara sendiri-sendiri telah menjalankan CSR baik bersifat filantropis maupun sudah mengadopsi konsep tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan secara penuh. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data dari perusahaan.

---

<sup>48</sup>Ir. H. Andi Senurdin Husaini, Ketua Komisi III DPRD Wajo, *Wawancara* 8 Agustus 2017 Di Kantor DPRD Kab. Wajo

<sup>49</sup>Ir. H. Andi Senurdin Husaini, Ketua Komisi III DPRD Wajo, *Wawancara* 8 Agustus 2017 Di Kantor DPRD Kab. Wajo

“Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Energi Sengkang dimulai sejak tahun 1998. Dalam pelaksanaannya PT. Energi Sengkang mendapat respon positif dari masyarakat”<sup>50</sup>

meskipun Undang-undang CSR belum ada aturan tentang CSR itu sendiri. Hal ini juga dipertegas oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Sebelum Perda ini dibuat sudah ada CSR yang dijalankan oleh perusahaan PT Energi Sengkang. Meskipun belum ada perda yang mengatur. Pihak perusahaan mungkin merasa sadar akan kewajibannya melaksanakan program CSR.”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa pihak perusahaan secara sadar menjalankan CSR meskipun belum ada aturan dari pemerintah daerah.

Terbentuknya peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang pada saat itu dibidangi oleh komisi II sekarang dibidangi komisi III sebenarnya telah dijalankan oleh perusahaan PT Energi Sengkang, akan tetapi masalah yang muncul adalah sulitnya anggota DPRD dalam mengevaluasi peraturan daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya FKTSP (Forum Koordinasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan) yang bertugas mengawasi pelaksanaan CSR. FKTSP (Forum Koordinasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan) dalam peraturan daerah (perda) kab. Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tepatnya pada bab

---

<sup>50</sup> Staf PT. Energi Sengkang, *Wawancara 2 Agustus 2017 Di Desa Patila.*

<sup>51</sup> Ir. H. Andi Senurdin Husaini, Ketua Komisi III DPRD Wajo, *Wawancara 8 Agustus 2017 Di Kantor DPRD Kab. Wajo.*

V pasal 13 dan 14 dijelaskan tentang FKTSP (Forum Koordinasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan).

FKTSP mempunyai tugas-tugas yang meliputi ;

- a. Mengkoordinasikan perencanaan TSP antar perusahaan;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan TSP antar perusahaan dan Pemerintah Kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan TSP baik antar perusahaan maupun perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten;
- d. Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan TSP;
- e. Uraian tugas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;<sup>52</sup>

Pembentukan FKTSP yang belum direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten menjadi penyebab sehingga tidak pernah dilakukan evaluasi pelaksanaan CSR meskipun Perda sudah disahkan pada tahun 2012.

Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan hanya berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama dengan pemerintahan daerah Kab. Wajo dan juga laporan yang mengenai program perusahaan yang sudah berjalan FKTSP (Forum Koordinasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan) adalah indikator yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Wajo pada Umumnya. Tidak terbentuknya FKTSP (Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan) disebabkan sampai saat ini belum ada Peraturan Bupati yang membentuk Forum tersebut. Selain itu, Peraturan Bupati juga berfungsi menguraikan

---

<sup>52</sup>Perda Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bab V.

aturan dalam Perda secara lebih khusus dan lebih detail karena Perda yang ditetapkan oleh anggota dewan masih bersifat umum. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan ketua pansus perumusan perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan berikut:

“Sampai saat ini belum ada laporan evaluasi terkait Perda Nomor 23 tahun 2012 tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dikarenakan forum yang berwenang melaporkan kegiatan yang diatur dalam Perda belum terbentuk karena belum ada intruksi dari pemerintahan daerah dalam hal ini Peraturan Bupati belum dibuat. Maka dari, itu sampai saat ini FKTSP belum memonitoring program dari CSR PT. Energi. Namun saya lihat CSR tetap berjalan meskipun berjalan sendiri-sendiri”<sup>53</sup>.

Dari hasil wawancara diatas masalah yang paling penting dalam tahap evaluasi peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan adalah belum adanya tindak lanjut dari pemerintahan daerah dalam hal ini belum dibentuk peraturan Bupati (Perbup) sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil perumusan Perda DPRD Kab. Wajo yang telah disahkan sejak tahun 2012.

Dengan tidak berjalannya FKTSP (Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan) yang menyebabkan proses evaluasi tidak pernah terlaksana dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak ada keterangan resmi apakah keberhasilan CSR sudah memenuhi standar sesuai yang aturan yang telah ditetapkan dalam Perda maupun undang-undang tentang Tanggungjawab

---

<sup>53</sup>Ir. H. Andi Senurdin Husaini, Ketua Komisi III DPRD Wajo, *Wawancara* 8 Agustus 2017 Di Kantor DPRD Kab. Wajo



Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Proses evaluasi yang terkendala tentu menjadi masalah yang cukup serius dalam proses penerapan CSR perusahaan mengingat bahwa dalam mengukur kesuksesan sebuah Peraturan Daerah (perda) haruslah dilakukan evaluasi.

Setiap penetapan sebuah peraturan daerah pasti memiliki kendala ataupun masalah yang muncul sama halnya dengan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2012 yang proses evaluasinya masih terhambat. Namun, berdasarkan hasil dilapangan terkait kesesuaian program yang diatur dalam Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan realitas yang terjadi dilapangan beberapa diantaranya sudah berjalan.

Beranjak dari hal tersebut beralih ke teks dari data yang didapatkan peneliti penilaian kepada program Peraturan daerah tersebut tidak membedakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Perihal tidak ada pernyataan yang secara jelas menunjuk komposisi laki-laki dan perempuan dalam program tertentu tidak dapat dikategorikan bias gender.<sup>54</sup> Karena berdasarkan teori Naila Kabeer bahwa suatu kebijakan dikatakan bias gender apabila kebijakan tersebut terjadi diskriminasi sumber daya produktif melalui akses, kontrol, partisipasi dan penikmatan sumber daya produktif.

---

<sup>54</sup>Riant Nugroho. *Gender Dan Administrasi Publik* (Cet I. Yogyakarta.2008. Pustaka Pelajar) h. 221.

Kebijakan netral gender dicirikan dari adanya kesetaraan gender dalam akses, kontrol, partisipasi dan penikmatan sumber daya produktif. Dalam teks bahwa semua indikator tersebut telah dipenuhi berikut dijelaskan:

- a. Akses : Perda sudah membuka lebar akses masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap program yang diatur dalam kebijakan tersebut, sebagaimana dalam kutipan Perda yang telah dipaparkan setiap bidang tetap menempatkan laki-laki dan perempuan pada proporsi masing-masing.
- b. Kontrol: dalam perda menegaskan bahwa masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan control atas pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
- c. Partisipasi: perempuan telah diberikan ruang yang sesuai yang diatur dalam peraturan daerah tersebut, sebagaimana hasil wawancara bersama ketua pansus pembentukan Perda tersebut mengatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diberikan ruang yang sama dalam program CSR yang akan dijalankan.
- d. Manfaat: laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan ruang untuk menikmati hasil-hasil sumber daya yang ada. Artinya bahwa peraturan tersebut sudah berada dalam tataran netral gender, dilihat dari teks yang ada dalam Perda menunjukkan bahwa manfaat dari program CSR yang dirancang memenuhi kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan.

Dari kesimpulan tersebut penulis telah menarik benang merah bahwa untuk mencapai sasaran PUG, perempuan didorong untuk mencapai standar yang sama dengan laki-laki. Hal ini dilakukan dengan mengurangi gap antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Program yang dirumuskan dalam peraturan daerah bab IV pasal 12 bisa dikatakan sebagai netral gender dikarenakan dalam program tersebut tidak didapatkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, menurut peneliti program yang dirumuskan di atas sudah ideal dengan tidak membedakan kesejahteraan antar laki-laki dan perempuan. Program diatas membuktikan bahwa kesejahteraan laki-laki dan perempuan sama pentingnya dihadapan negara.

**C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ditinjau dari persepektif gender.**

Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak

dapa dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijkaan itu sendiri.<sup>55</sup>

Pada prinsipnya implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek kemudian kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Tak terkecuali implelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan langsung terimplementasi dalam bentuk program. berikut program CSR dari PT. Energi Sengkang yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan.

Bidang Pendidikan, Sasaran dari kegiatan ini adalah upaya untuk meningkatkan minat baca dari masyarakat Wajo dengan membangun perpustakaan. Program lainnya yaitu program magang dan beasiswa dimana setiap tahun siswa lulusan SMA terbaik di Kabupaten Wajo sebanyak 2 orang

---

<sup>55</sup>Budi Winarno, *Teori & Proses Kebijakan Publik*, h. 177.

mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Ujung Pandang selama 3 tahun dan setelah itu dilanjutkan dengan program magang selama 1 tahun di PLTGU Sengkang. Program lainnya yaitu pemberian bantuan berupa perbaikan fasilitas dan insentif pengajar di Taman Kanak-Kanak daerah sekitar perusahaan. Semua program dirancang dengan sistem kemitraan agar dapat dicapai sinergi oleh pihak yang terlibat dalam program. Hal ini sejalan dengan program dalam Parturan Daerah bagian point B.

Bidang Kesehatan, PT. Energi Sengkang secara aktif berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Wajo yang antara lain diwujudkan dengan Pembuatan posyandu yang tersebar di beberapa daerah di Kecamatan Pammana dan khusus di Desa Patila sebanyak 2 posyandu. Program lainnya yaitu Bantuan berupa pengadaan UKS beserta perlengkapannya di beberapa sekolah di Kecamatan Pammana serta penyediaan bak sampah untuk tiap-tiap rumah.

Bidang Ekonomi, Program ini diupayakan untuk membuka kesempatan yang lebih luas pada penyedia jasa dari masyarakat lokal untuk berkontribusi pada penyediaan makanan untuk kebutuhan karyawan perusahaan. Program lainnya yaitu pemberian bantuan dana berputar agar dapat tercipta kemandirian bagi para pelaku usaha dan memberikan prioritas pada pengusaha lokal untuk menjadi penyedia jasa dan barang untuk

perusahaan. Namun, untuk bidang kegiatan yang satu ini masih dalam tahap perencanaan perealisasi sesuai dengan data dari PT. Energi Sengkang.

Bidang Sosial, Program ini sebagai bentuk partisipasi PT. Energi Sengkang terhadap masyarakat sekitar dengan berperan serta pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah sekitar dan pemberian bantuan kepada yang terkena bencana alam dan sebagainya. Seperti Perayaan peringatan HUT Kemerdekaan RI, Kegiatan-kegiatan keagamaan, bantuan korban banjir dan lain-lain. Hal tersebut didapat dari hasil wawancara

“PT. Energi turut andil dalam pelaksanaan hari raya dan juga kerjasama sosial lainnya adapun umpan balik dari pemerintah kecamatan yaitu dengan memastikan keamanan di sekitar perusahaan tidak ada gangguan dari pihak manapun. peran PT. Energi adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Kegiatan ini juga mampu menumbuhkan rasa kebersamaan antar pihak perusahaan dan masyarakat agar pihak perusahaan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan”.<sup>56</sup>

Bidang Lingkungan, Program ini bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar lokasi perusahaan dan lingkungan masyarakat setempat. Bentuk programnya yaitu penanaman pohon yang dilakukan pada area sekitar pembangkit untuk mengurangi tingkat kebisingan di beberapa daerah sekitar pemukiman masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, pembibitan tanaman, serta pembuatan kolam air yang dapat berfungsi sebagai embun jika diperlukan, program kelestarian lingkungan

---

<sup>56</sup>A. Hasrianti, Kabid Pembangunan Camat Pammana, *Wawancara*, Di Kantor Camat Pammana Tanggal 6 Juli 2017.

adalah kebutuhan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa daerah disekitar industri sangat rentan dengan pencemaran lingkungan, oleh karna itu tentunya perusahaan bertanggung jawab bagaimana kelestarian lingkungan didaerah sekitar perusahaan dapat tetap terjaga. Penanaman pohon adalah salah satu contoh pelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan, selain itu pengolahan limbah perusahaan juga harus memiliki sistem yang bagus agar limbah perusahaan tidak tercemar dan berdampak buruk terhadap masyarakat. Pengelolaan limbah domestik dilakukan oleh perusahaan serta pembuatan danau buatan dilokasi perusahaan. Disamping itu, terdapat beberapa tanaman yang ditanam dilingkungan sekitar kemudian buah dari tanaman tersebut 36 diberikan kepada masyarakat sekitar untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan ekonomi.

Dari kegiatan atau program tersebut akan dilihat sejauh mana peran perempuan dalam turut andil dalam pelaksanaan CSR. Analisis gender yang dapat dilihat dari data terpilah gender antara perempuan dan laki-laki, diantaranya dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender. Analisis gender dalam CSR PT. Energi yang diatur dalam Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2012 dilihat dari karakteristik program terpilah antara perempuan dan laki-laki tersebut merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam pelaksanaan kegiatan. Kesetaraan gender dalam program tersebut



dianalisis dengan melihat dan mengukur akses, kontrol atau kuasa dan manfaat yang dinikmati (peningkatan pendapatan, peningkatan status sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemampuan berwirausaha) yang dirasakan perempuan. Dari hasil wawancara telah didapati bahwa beberapa perempuan bekerja sebagai *cleaning service* di dalam perusahaan dengan persetujuan pemerintahan Desa hal ini diperkuat dari hasil wawancara berikut:

“Masalah pekerjaan baik laki-laki maupun perempuan telah banyak dipekerjakan dalam perusahaan, pemerintahan desa mengusulkan bahwa untuk tenaga kerja diprioritaskan warga desa Patila meskipun kebanyakan dari warga tersebut bekerja sebagai buruh, mayoritas perempuan dari desa patila bekerja sebagai *cleaning service* dan laki-laki kerja sebagai buruh”.<sup>57</sup>

Semakin tinggi tingkat akses, kontrol, dan manfaat yang dinikmati perempuan, maka kesetaraan gender dalam kegiatan telah setara gender. Namun juga masalah-masalah seperti area domestic bagi perempuan merupakan juga suatu hambata sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kalau soal manfaat dari CSR sebenarnya perempuan sudah menikmati terlebih lagi dari program posyandu yang rutin dilaksanakan itu menurut saya bermanfaat banyak bagi perempuan namun untuk keseluruhan masih ada yang belum mendapat manfaat tersebut. Artinya manfaat CSR belum maksimal menyentuh masyarakat”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Hj. Patmawati, Kepala Desa Patila, *Wawancara*, Dikantor Desa Patila Pada Tanggal 3 Juli 2017.

<sup>58</sup>Rakhmat S.kom, Sekretaris Desa Patila, *Wawancara* Di Kantor Desa Patila Tanggal 20 Juli 2017.



Perempuan memang memiliki jumlah kegiatan yang lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan tidak hanya mengerjakan kegiatan reproduktif dan kegiatan sosial kemasyarakatan tetapi juga turut serta dalam mengerjakan kegiatan produktif sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu kurangnya partisipasi perempuan dalam beberapa program CSR.

Dalam mengimplementasikan CSR, PT. Energi Sengkang memiliki tujuan menciptakan manfaat yang berkelanjutan pada masyarakat sehingga tercapai rasa memiliki yang tinggi dari segenap stakeholder dengan usaha yang dilakukan adalah membangun kapasitas masyarakat Wajo mulai dari perbaikan kesehatan pada usia emas dan meningkatkan pengetahuan agar mempunyai keunggulan bersaing dimasa mendatang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara berikut.

“PT. Energi Sengkang membangun infrastruktur berupa pembuatan posyandu yang tersebar di beberapa daerah di Kecamatan Pammana dan khusus di Desa Patila sebanyak 2 posyandu selain itu juga memberdayakan kader-kader Posyandu yang digaji langsung oleh perusahaan. Program lainnya yaitu Bantuan berupa pengadaan UKS beserta perlengkapannya di beberapa sekolah di Kecamatan Pammana”.<sup>59</sup>

Kemudian dipertegas lagi dengan hasil wawancara berikut:

“PT Energi Sengkang rutin melaksanakan posyandu kepada masyarakat dengan memfasilitasi Dokter yang disediakan oleh perusahaan serta pemberian makanan tambahan anak usia dini”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Nurhaedah, Kader Posyandu, *Wawancara*, Di Desa Patila Tanggal 3 Juli 2017.

<sup>60</sup>A. Hasrianti, Kabid Camat Pembangunan Pammana, *Wawancara*, Di Kantor Camat Pammana Tanggal 6 Juli 2017.

PT. Energi Sengkang melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga bertujuan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat Pihak PT. Energi terjun langsung ke masyarakat sebagaimana informasi dari hasil wawancara

“Metode yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi setiap masalah yaitu dengan melakukan peninjauan secara langsung ke masyarakat sekitar dan juga dengan melakukan pertemuan antara pemerintahan desa dengan pihak perusahaan guna membahas program yang sesuai kebutuhan masyarakat desa Patila”<sup>61</sup>

Namun seiring kerjasama pemerintah desa patila dengan PT. Energi masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang CSR dari perusahaan. Masyarakat merupakan sasaran dari program CSR, pemahaman masyarakat tentang CSR atau Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah hal terpenting dalam mengoptimalkan implementasi namun seperti yang dijumpai dilapngan pengetahuan tentang CSR masih kurang segaimana hasil wawancara berikut:

“Saya tidak tau kalau ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, saya hanya tau kalau bangunan posyandu beserta kursinya bantuan dari Posyandu”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap program CSR perusahaan belum maksimal, minimnya pengetahuan masyarakat tentang CSR dikarenakan kurangnya sosialisasi

---

<sup>61</sup>Hj. Patmawati, Kepala Desa Patila, *Wawancara* Di Kantor Desa Patila Tanggal 3 Juli 2017.

<sup>62</sup>Sitti Alang, Masyarakat Desa Patila, *Wawancara* di Desa Patila 15 Juni 2017.

perusahaan kepada masyarakat baik melalui kerjasama pemerintahan desa maupun langsung terjun melakukan sosialisasi yang secara menyeluruh. Hal tersebut juga diperkuat dari argument berikut:

“Masih banyak memang perempuan yang tidak memahami hak-hak mereka. Karena kurangnya kesadaran dan juga informasi yang kurang memadai ditambah memang lingkungan sosial dan budaya yang tidak kondusif. Budaya patriarki yang kuat sehingga kebanyakan perempuan memilih jadi ibu rumah tangga dan tidak terlibat dalam hal perencanaan ataupun yang terkait CSR. Kecuali yang memang dikhususkan kepada perempuan dipanggil langsung dari pemerintahan desa kalau untuk mencari nafkah Perempuan umumnya membantu suami mereka mencari nafkah dengan berdagang di sekitar rumah. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan perempuan dalam mengerjakan kegiatan mengurus rumahtangga dan mencari nafkah secara bersamaan”.<sup>63</sup>

Namun tidak semua perempuan juga mengalami hal tersebut sesuai tuturan dari hasil wawancara berikut

“Pihak PT. Energi juga sudah menjalankan program pemberdayaan PKK juga ada kerjasama ketika menjelang hari kemerdekaan saya sendiri sering aktif kalau ada panggilan”.<sup>64</sup>

Sementara harapan pemerintah desa Patila untuk program selanjutnya yakni pemberian bantuan kepada ibu rumah tangga berupa konveksi yang juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bidang ekonomi sebagaimana tuturan dalam hasil wawancara berikut :

---

<sup>63</sup>Rakhmat S.kom, Sekretaris Desa Patila, *Wawancara Di Kantor Desa Patila Tanggal 20 Juli 2017*.

<sup>64</sup>Megayanti, Tim Penggerak PKK Desa Patila, *Wawancara Di Desa Patila Tanggal 12 Juli 2017*

“Harapan untuk program selanjutnya yaitu bantu konveksi kepada ibu-ibu rumah tangga, hal tersebut sudah saya sampaikan pada waktu rapat kemarin, untuk sementara kita menunggu realisasi dari rapat kemarin dengan pihak perusahaan”.<sup>65</sup>

Penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dilapangan dari berbagai hasil wawancara diatas berdasarkan beberapa informan maka data tersebut dapat dideskripsikan kedalam beberapa point merujuk kepada model implemtasi dari Naila kabeer. Peneliti menggunakan Teori tersebut dianggap lebih rasional dan tepat untuk menunjukkan peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai adalah kebijakan yang netral gender yang dicirikan dari adanya kesetaraan gender dalam akses, kontrol, partisipasi, dan penikmatan sumber produktif yang tersedia didalam masyarakat.

Penjelasn dari hasil wawancara didapatkan bahwa perempuan dan laki-laki sudah memiliki kesamaan dalam mengakses beberapa program yang telah diatur namun masih tetap didominasi kaum laki-laki. Sementara perempuan hanya aktif ketika ada panggilan langsung dari pemerintahan desa. Partisipasi perempuan dalam program yang telah diatur dalam paeraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab

---

<sup>65</sup>Hj. Patmawati, Kepala Desa Patila, *Wawancara* Di Kantor Desa Patila Tanggal 3 Juli 2017

Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah dikatakan aktif namun belum menyeluruh. Perempuan seperti yang telah diperoleh dari hasil wawancara bahwa kurang memperhatikan persoalan CSR kontrol menurut mereka bukan suatu kewajiban mereka. Persoalan manfaat, laki-laki dan perempuan sudah merasakan manfaat yang sama dari program CSR perusahaan.

Sejak perempuan dan laki-laki mempunyai peran gender yang berbeda dan melakukan jenis pekerjaan yang beda, mereka mempunyai tingkat akses yang berbeda pula terhadap pelayanan dan sumber-sumber daya, dan mengalami relasi yang timpang. Kebutuhan perempuan dan laki-laki bisa juga berbeda. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan perempuan didalam peran sosial mereka di dalam masyarakat yang diterima secara sosial. Mereka tidak menentang meskipun kebutuhan itu muncul dari pembagian kerja berdasarkan berdasarkan gender dan posisi subordinasi perempuan dalam masyarakat

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai hasil yang telah didapatkan selama melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah dalam tataran netral gender perda pasalnya indikator netral gender dari Naila kabeer sudah terpenuhi. akses masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap program sudah terbuka lebar, kemudian kontrol dalam perda menegaskan bahwa masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Lanjut, partisipasi perempuan telah diberikan ruang yang sesuai yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Manfaat, laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan ruang untuk menikmati hasil-hasil sumber daya yang ada.
2. Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengalami hambatan dalam hal memonitoring program CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo. Selain itu juga masih banyak dijumpai masyarakat yang kebingungan tentang kegiatan-kegiatan atau bantuan yang diberikan oleh PT. Energi Sengkang.

## **B. Implikasi Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Program CSR yang diberlakukan oleh perusahaan tidak berdampak diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain sudah dalam tataran netral gender.
2. Berdasarkan penelitian ini harusnya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak perusahaan dalam melaksanakan program CSR.



### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Kementrian Agama RI, Bandung :CV. Penerbit J-ART, 2004.
- Sahih Muslim*, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairial-Naisaburi, juz 4 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th).
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Fukuyama, Francis. Penerjemah A. Zaim Rofiqi, *Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan Dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi Dan Kepentingan*. Cet I;Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2015.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Cet. I; Jakarta: Gradedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti, Untuk Pelayanan Publik*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2016.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada 2004
- Nugroho, Riant. *Gender dan Administrasi Publik*. Cet I; Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nugroho, Riant. *Gender Dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Cet I; Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta :Elex Media Komputindo, 2004.



- Puspitawati, H. *Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda Tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Siregar, Sofyan. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Cet. III; Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Solihin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Subarsono, Ag. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep. Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Paramadina. 1999.
- Wicaksono Kristian, *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.
- Hikma Abd. Hakim S, Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Di Kabupaten Morowali Utara. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin. 2015.
- Nur Awaliah Mahdi, “Politik Lingkungan (Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Semen Tonasa).*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014.
- Syandi Negara, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Social Perusahaan Di Kota Serang. *Skripsi*, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang. 2016.
- Husain, Djariah dan Suraedah Hading. “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Sector Pendidikan”. *Bunga Wellu*, vol. 14 no. 1 (2009). [http:// digilib.unm.ac.id/files/manual/bungawellu/DJAMIAH %20HUSAIN.pdf](http://digilib.unm.ac.id/files/manual/bungawellu/DJAMIAH%20HUSAIN.pdf) (Diakses 2 April 2017).
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti Dkk. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. vol. 11 no. 1, (Januari 2011). <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=105984&val=2287> (Diakses 2 April 2017).
- Prastiwi, Debbie Luciani Dan Titik Sumarti. “Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Csr Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT.

Holcim Indonesia Tbk”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 6 no. 1 (April 2011). <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/54380/1/I12dlp.pdf> (Diakses 2 April 2017).

Rusmin, Andi P, Dkk, “Analisis Peran Publik Relations (Pr) Dalam Penanganan Opini Dan Sikap Komunitas Sekitar Terhadap Program Corporate Social Responsibility (Csr) PT. Energy Sengkang Di Kabupaten Wajo”, *Jurnal Komunikasi Kareba*, vol. 4 no 4. (Desember 2015). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/634/453> (Diakses 12 Desember 2016).



## Daftar riwayat hidup



Nama Sulfiana lahir di Pattiro Kab. Bone pada tanggal 17 Desember 1994 anak ketiga dari 4 bersaudara lahir dari pasangan Muh. Aras dan Bunga. Adapun pendidikan yang ditempuh yaitu SDN 327 Simpursia kec. Pammana Kab. Wajo pada tahun 2001-2007, SMPN 5 Pammana Kab. Wajo tahun 2007-2010, kemudian SMAN 3 Sengkang Unggulan Kab. Wajo (sekarang SMAN 7 Wajo)

tahun 2010-2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Uinversita negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Ilmu Politik pada tahun 2013-2017. Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu pada saat SD aktif dalam Organisasi pramuka, kemudian SMP menjabat sebagai ketua Osis periode 2008-2009, kemudian setelah SMA bergabung dalam organisasi KIR (Karya Ilmiah Remaja) dan Pers Mading. Pada saat kuliah penulis bergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), penulis juga aktif dalam organda HIPERMAWA komisariat Pammana, penulis juga pengurus dema periode 2016-2017.